



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 157/HUMAS PMK/IX/2020

Kemenko PMK Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Jakarta (22/9) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019. Opini WTP tahun 2019 ini menandai pencapaian 10 kali berturut-turut yang diraih Kemenko PMK.

Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, secara daring, pada Selasa (22/9).

Untuk tahun 2020 ini, pemerintah memberikan penghargaan 10 kali berturut-turut opini WTP kepada 41 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dari provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu penerima capaian terbaik ini adalah Kemenko PMK.

Pemerintah juga memberikan penghargaan 5 kali berturut-turut opini kepada 286 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan opini WTP tahun 2019 kepada 571 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Opini WTP adalah salah satu opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi sekaligus menghargai capaian 10 kali opini WTP berturut-turut yang diraih kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, capaian ini menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan baik.

"Karena ini pencapaian yang konsisten dan milestone yang luar biasa semenjak kita pertama kali mulai melaksanakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara," ujarnya.

Sri berharap, capaian yang baik tersebut tidak dicerai oleh tindakan-tindakan yang tercela, serta dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah lainnya.

"Saya berharap capaian dari mereka yang mencapai 10 kali berturut-turut opini WTP bisa menjadi contoh dan tidak dicerai oleh berbagai tindakan, atau hal-hal yang bisa menumbuhkan perasaan bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan tata kelola yang baik," pungkas Sri Mulyani.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**